

ABSTRAK

RISKA RAMDANI., Jaringan Kebijakan Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Di Kota Makassar (dibimbing oleh Muhammad Tahir dan Rulinawati Kasmad)

Perumusan kebijakan dengan pendekatan jaringan penting dalam menyelesaikan problem sosial yang bersifat kompleks dan merancang kebijakan berbasis pemberdayaan sehingga melalui perumus kebijakan pemberdayaan sebagai wadah jaringan, pihak yang berkepentingan dapat mengakses proses perumusan kebijakan tersebut untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis proses jaringan perumusan kebijakan pemberdayaan UKM di Kota Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Aktor pada perumus kebijakan pemberdayaan usaha kecil menengah adalah Pemerintah Kota Makassar, Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Fungsi jaringan kebijakan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing aktor. Tidak ada struktur dalam jaringan kebijakan pemberdayaan usaha kecil menengah. Pelembagaan pada jaringan kebijakan pemberdayaan Perwali No,98 Tahun 2016. Pola interaksi atau kebiasaan yang mengatur pertukaran sumber daya tidak nampak. Distribusi kekuasaan terjadi cukup signifikan dan seimbang. Strategi aktor lebih merujuk pada tanggung jawab masing-masing aktor.

Kata Kunci: Jaringan, aktor, pemberdayaan